

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Ruang Lingkup Audit Pelaporan**

##### **2.1.1 Audit Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berikut ini pengertian laporan keuangan dari beberapa sumber:

Menurut Munawir (2004:2) mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut: **“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas dari perusahaan tersebut”**.

Menurut Harahap (2002:7) mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

**“Laporan keuangan merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya”**.

Laporan keuangan merupakan acuan bagi auditor untuk memeriksa apakah pelaporannya terdapat identifikasi kecurangan. Boyton (2003:50) menjelaskan tentang azas – azas yang mendasari audit laporan keuangan, yaitu :

a. Hubungan antara akuntansi dan auditing

Akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi entitas berupa catatan akuntansi yang hasilnya berupa penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip –

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit laporan keuangan terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri. Tujuan utama audit laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan untuk menambah keandalan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.

b. Pembuktian dan pertimbangan profesional dalam audit laporan keuangan

Audit dilakukan berdasarkan asumsi bahwa data laporan keuangan dapat diteliti untuk pembuktian (*verifiable*) apabila dua atau lebih orang yang memiliki kualifikasi dapat memberikan kesimpulan yang serupa dari data yang diperiksa. Auditor mencari dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dari laporan keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor memperoleh bukti – bukti untuk meyakinkan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksi dan saldo. Dalam konteks ini, validitas berarti otentik, mantap atau memiliki dasar yang kokoh, sedangkan ketepatan berarti sesuai dengan aturan – aturan akuntansi yang ditetapkan.

c. Kebutuhan akan audit laporan keuangan

Kebutuhan akan audit laporan keuangan sangat diperlukan bagi para pemakai laporan keuangan seperti dan para pemegang saham, oleh karena itu para pemakai mencari keyakinan dari auditor independen bahwa laporan keuangan terbebas dari kepentingan manajemen dan netral untuk sekelompok pemakai laporan keuangan serta tidak meningkatnya resiko interpretasi dan resiko timbulnya kesalahan serta kecurangan.

d. Manfaat ekonomi suatu audit

Manfaat yang didapat dari audit laporan keuangan adalah adanya akses ke pasar modal, biaya modal yang lebih rendah, penanguhan kecurangan, peningkatan pengendalian dan operasional.

Audit laporan keuangan bertujuan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan kriteria tertentu. Audit laporan keuangan ini berdasarkan daftar kumpulan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Daftar kumpulan aset tetap mempunyai tujuan atas pemeriksaan tersebut yaitu untuk menentukan bahwa aset tersebut memang ada, menetapkan hak milik atas aset tetap dan apakah aset tetap tersebut dijadikan jaminan, dll. Aset tetap merupakan aset berwujud dan dikategorikan jika memenuhi kriteria berikut :

- a. Aset berwujud tersebut diperoleh dan dibentuk oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasi perusahaan selama lebih dari satu tahun, tidak untuk dijual dalam kegiatan – kegiatan normal perusahaan dan ada kemungkinan besar perusahaan nantinya akan memperoleh keuntungan ekonomis dari aset tersebut.
- b. Biaya perolehan aset tetap dapat dihitung secara pasti.
- c. Aset bernilai lebih dari Rp. 500.000 atau satuan.

### **2.1.2 Pengertian Laporan Audit**

Analisis harus memahami implikasi pendapat audit terhadap pemakai laporan keuangan dan harus menghargai keterbatasan pendapat audit terhadap pemakai laporan keuangan. Auditor biasanya melakukan audit sesuai dengan Standar Auditing yang Berlaku Umum (*Generally Accepted Auditing Standards – GAAS*). Standar audit

merupakan alat pengukur untuk menilai kualitas prosedur audit. Standar ini bertujuan untuk memastikan tanggung jawab auditor dengan jelas dan dinyatakan dengan tegas serta bahwa tingkat tanggung jawab yang diasumsikan telah jelas bagi pemakai laporan keuangan. Standar audit berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan yang harus dilakukan, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur audit. Standar audit berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor, namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis opini auditor, yaitu:

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian adalah jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti terdapat dalam standar profesional akuntan publik dan telah mengumpulkan bahan – bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak ditemukan kesalahan yang material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*unqualified opinion with explanatory language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain dalam laporan

audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal – hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Laporan jenis ini dikeluarkan apabila auditor percaya bahwa laporan secara keseluruhan disajikan secara wajar namun ruang lingkup audit dibatasi maupun data keuangan menunjukkan suatu kegagalan dalam mengikuti prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.

d. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan yang disajikan tidak secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan jenis ini dikeluarkan apabila auditor percaya bahwa laporan yang telah disajikan salah secara material atau menyesatkan (*materially misstated atau misleading*) secara keseluruhan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan entitas, atau hasil usaha, dan operasi entitas dan arus kas sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan yang telah diaudit. Laporan jenis ini dikeluarkan apabila

auditor tidak dapat merasa puas bahwa laporan secara keseluruhan disajikan secara wajar atau auditor tidak independen.

Laporan audit merupakan media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan temuan auditor kepada pemakai khususnya laporan keuangan. Laporan audit menambah nilai (*add value*) karena opini auditor yang objektif dan independen terhadap kewajaran suatu laporan. Laporan audit dapat didefinisikan sebagai laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan bahwa laporan keuangan tersebut tidak dipengaruhi oleh salah saji yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen aset perusahaan. Dalam laporan audit perusahaan memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan disajikan secara wajar.

### **2.1.3 Pengertian Manajemen Letter**

Manajemen letter adalah salah satu pernyataan yang dibuat oleh auditor kepada *auditee*. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang telah diperiksa laporan keuangannya (diaudit), yang berisi tentang kelemahan dari struktur pengendalian internal perusahaan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran – saran perbaikan dari KAP.

Menurut *Meigs, Whittington and Meigs* (2001), manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan – kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan

mengevaluasi pengendalian internal perusahaan. Disamping untuk menyampaikan informasi – informasi yang bermanfaat kepada manajemen, manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya dikemudian hari kelemahan dalam pengendalian internal mengakibatkan kerugian perusahaan.

## **2.2 Kecurangan**

### **2.2.1 Pengertian Kecurangan**

Jenis kecurangan yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda karena praktik kecurangan antara lain sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Negara – negara maju yang penegakan hukum sudah berjalan dengan baik, kondisi masyarakat secara umum ekonominya cukup atau lebih dari cukup maka pada umumnya praktik – praktik kecurangan lebih sedikit kecurangan dalam hal modus operamandi yang berupa penipuan, pemalsuan. Menghalalkan semua cara, penggunaan wewenang atau kekuasaan yang salah serta selalu berlindung dibalik pembenaran hukum merupakan sebagian ciri – ciri praktik operasional kecurangan.

Kecurangan merupakan manipulasi data atau informasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya, segala bentuk dan aspek informasi keuangan yang paling banyak digunakan untuk memanipulasi data. Kecurangan merupakan proses pembuatan, beradaptasi, dan meniru dengan maksud untuk membuat kebohongan dan menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan yang memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Dalam pengertian luas, kecurangan adalah suatu bentuk penipuan yang disengaja atau direncanakan demi keuntungan dan kemakmuran pribadi atau perseorangan atau untuk merusak dan mengganggu kehidupan serta kekayaan orang lain. Kecurangan merupakan sebuah istilah yang memiliki arti umum dan luas, mencakup semua bentuk kelicikan atau tipu daya manusia yang dipaksakan oleh satu orang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan memberikan keterangan palsu dan telah dimanipulasi.

Secara harafiah kecurangan didefinisikan sebagai *fraud* namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut. Kecurangan tersebut didefinisikan secara berbeda – beda oleh para praktisi dan akademisi. Berikut ini merupakan definisi kecurangan dari berbagai sudut pandang yang berbeda:

Menurut *Arens*, mendefinisikan kecurangan sebagai berikut: **“Kecurangan terjadi ketika salah saji dibuat dalam suatu keadaan yang mengetahui bahwa hal itu adalah suatu kepalsuan dan dilakukan dengan maksud untuk melakukan kecurangan”**.

Menurut *Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99*, mendefinisikan kecurangan sebagai berikut: **“Tindak kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit”**.

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, mendefinisikan kecurangan sebagai berikut:

**“Perbuatan – perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk**

**mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain”.**

Menurut *Oxford English Dictionary*, mendefinisikan kecurangan sebagai berikut:

**“Sebuah tindak pidana kecurangan dengan menggunakan penyajian yang palsu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil atau mengambil paksa hak atau kepentingan orang lain”.**

Menurut *Binbangkum, n. d.*, mendefinisikan kecurangan sebagai berikut: **“Suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah saji menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi”.**

Dari beberapa definisi atau pengertian kecurangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian kecurangan sangat luas dan dapat dilihat dari beberapa kategori kecurangan. Menurut *Binbangkum (n.d)* secara umum, unsur – unsur dari kecurangan adalah :

- a. Harus terdapat salah pernyataan atau penyajian yang keliru (*misrepresentation*);
- b. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
- c. Fakta bersifat material (*material fact*);
- d. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- e. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak bereaksi;

- f. Pihak yang dirugikan harus bereaksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*);
- g. Mengakibatkan kerugian (*detriment*).

Sedangkan kesalahan (*error*) adalah salah saji yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak disengaja, yang dalam keadaan tersebut para pengambil keputusan dapat berubah keputusannya. Keadaan – keadaan berikut ini yang termasuk dalam kriteria kesalahan (*error*) :

- a. Kesalahan – kesalahan dalam pengumpulan atau pemrosesan data akuntansi;
- b. Taksiran akuntansi yang tidak besar yang berasal dari salah penafsiran;
- c. Kesalahan dalam penerapan prinsip – prinsip akuntansi, yang berkenaan dengan jumlah, klasifikasi, dan cara penyajiannya ataupun pengungkapannya.

### **2.2.2 Jenis – Jenis Kecurangan**

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam *Prasetya (Peak Indonesia 2003)* kecurangan diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu kecurangan pekerjaan, kecurangan manajemen, kecurangan investasi, kecurangan penyediaan, dan kecurangan pelanggan. Tabel 2.1 mengenai jenis – jenis kecurangan akan menjelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jenis - Jenis Kecurangan

Jenis Kecurangan	Korban	Pelaku	Penjelasan
Penggelapan uang atau kecurangan pekerjaan	Pegawai	Pemberi kerja	Pemberi kerja secara langsung atau tidak langsung mengambil hal dari pekerjanya
Kecurangan Manajemen	Pemegang saham	Manajemen tingkat atas	Manajemen tingkat atas memberikan penyajian yang salah pada informasi keuangan
Kecurangan Investasi	Investor	Individu	Individu menipu investor dengan menanamkan uangnya dalam investasi yang salah
Kecurangan Penyediaan atau logistik	Pembeli barang atau jasa	Penjual barang atau jasa	Mengenakan biaya yang berlebih atas barang atau jasa kepada pembeli
Kecurangan Pelanggan	Penjual barang atau jasa	Pelanggan	Pelanggan meminta harga yang lebih kecil dari harga yang seharusnya

Sumber :

ACFE dalam Prasetya (2003)

### 2.2.3 Pohon Kecurangan

Pohon kecurangan atau disebut juga dengan *Fraud Tree* yang secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan cabang – cabang dari kecurangan dalam bentuk skema hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Terdapat tiga cabang utama, yakni *Corruption*, *Asset Misappropriation*, *Fraudulent Statements*.

a. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi atau banyak terjadi di negara – negara yang memiliki sistem penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Jenis kecurangan ini paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain, seperti suap dan korupsi yang memiliki hubungan *simbiosis mutualisme*;

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

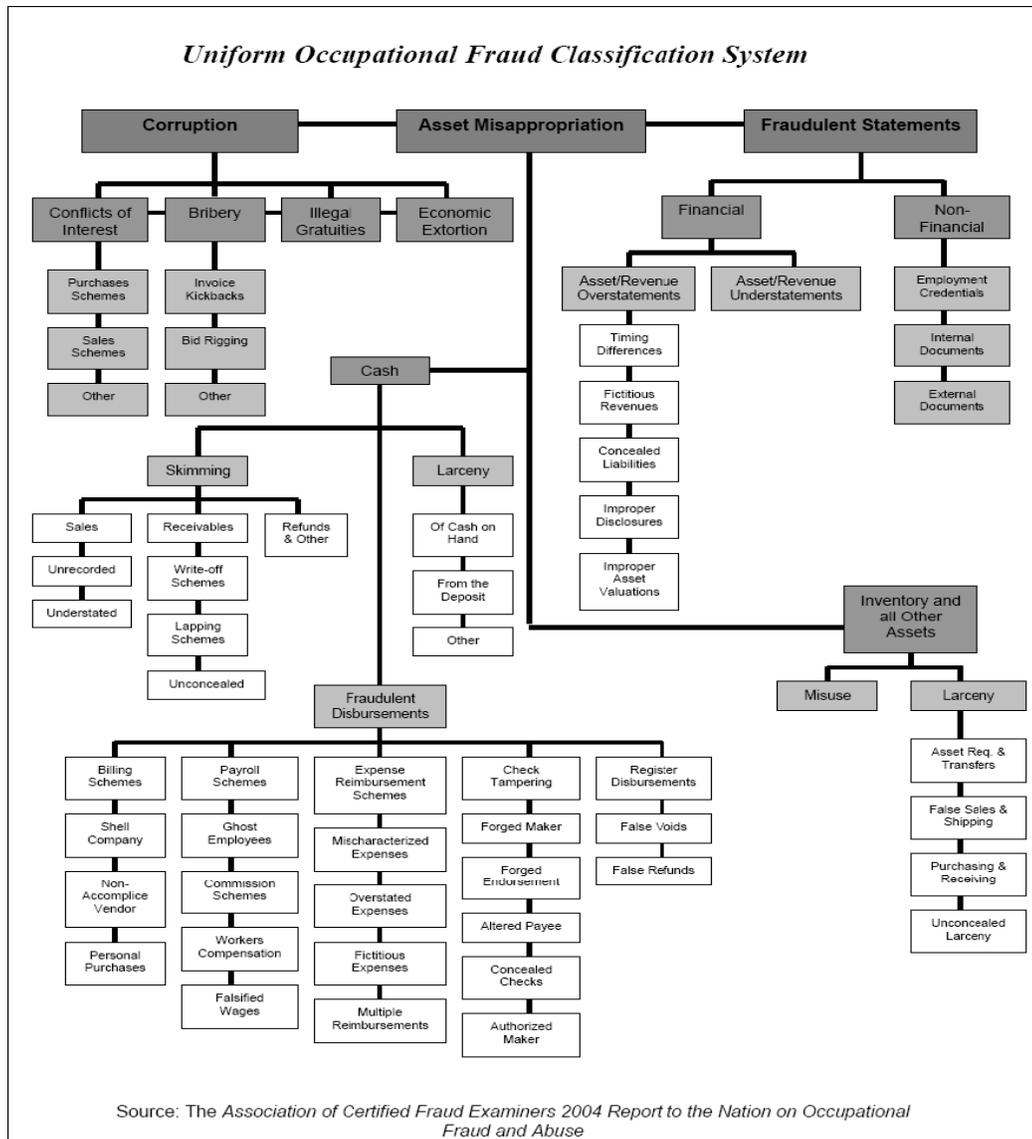
Penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. *Asset Misappropriation* atau “pengambilan” aset secara ilegal merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur atau dihitung;

c. Penipuan Laporan (*Fraudulent Statements*)

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan.

Gambar 2.1

Pohon Kecurangan



Sumber : ACFE (2004)

2.2.4 Pelaku Kecurangan

Dalam literatur akuntansi, kecurangan biasanya juga disebut sebagai kejahatan kerah putih, pengingkaran, penggelapan, dan ketidakwajaran. Kecurangan dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kesempatan dan tanpa mengenal kedudukan (Nguyen, 2008). Auditor biasanya berhubungan dengan kecurangan pada dua tingkat. Oleh karena itu tiap bentuk kecurangan memiliki berbagai implikasi yang berbeda bagi auditor, maka kedua tingkat kecurangan ini akan dibedakan.

1. Kecurangan oleh karyawan (*employee fraud*), biasanya melibatkan karyawan bawahan yang didesain untuk secara langsung mengonversi kas atau aset lainnya demi keuntungan pribadi karyawan terkait. Kecurangan oleh karyawan biasanya melibatkan penyalahgunaan aset, yang merupakan proses tiga tahap: (a) mencuri sesuatu yang bernilai (aset), (b) mengonversi aset tersebut ke dalam bentuk yang dapat digunakannya (uang), (c) menutupi kejahatan tersebut untuk menghindari deteksi. Tahap ketiga sering kali merupakan tahap yang paling sulit. Karyawan pada tingkat menengah dan rendah. Karyawan ini bertanggungjawab pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain, dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi (Wells, 2005).
2. Kecurangan oleh pihak manajemen (*management fraud*), kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut *white collar crime*. Ketika melakukan kecurangan mereka lebih tidak terlihat daripada kecurangan oleh karyawan, karena sering kali kecurangan semacam ini lolos dari deteksi sampai terjadinya kerusakan atau kerugian besar yang menyulitkan perusahaan. Biasanya kecurangan oleh pihak

manajemen tidak melibatkan pencurian langsung aset. Pihak manajemen puncak dapat melakukan berbagai aktivitas kecurangan untuk mendapatkan nilai saham yang lebih tinggi. Hal ini mungkin dilakukan untuk memenuhi harapan para investor atau untuk memanfaatkan opsi saham yang dimasukkan dalam paket kompensasi manajemen terkait. Kecurangan inipun disebut sebagai kecurangan kinerja (*performance fraud*), yang sering kali melibatkan praktik penipuan untuk menggelembungkan pendapatan atau untuk menunda pengakuan kebangkrutan atau penurunan pendapatan. Kecurangan pihak manajemen pada tingkat lebih rendah biasanya melibatkan penyajian data keuangan atau laporan internal yang salah untuk mendapatkan kompensasi tambahan, mendapatkan promosi, atau untuk meloloskan diri dari penalti akibat buruknya kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* mempelajari sejumlah faktor yang mencirikan pelaku kecurangan, termasuk posisinya dalam perusahaan, kolusi dengan pihak lain, gender, umur dan pendidikan.

1. Gender, walaupun gambaran demografis berubah – ubah, ada lebih banyak laki – laki daripada perempuan yang menduduki jabatan penting dalam perusahaan, hingga mereka lebih banyak akses ke aset;
2. Posisi, mereka yang memiliki posisi paling tinggi adalah yang memiliki akses terbesar ke dana serta aset lain perusahaan;
3. Usia, karyawan yang lebih tua cenderung memiliki pendidikan lebih tinggi menempati jabatan yang lebih tinggi pula dalam perusahaan, dan karenanya memiliki akses yang lebih besar ke dana serta aset lain perusahaan;

4. Pendidikan, secara umum mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi pula dalam perusahaan, dan karenanya memiliki akses yang lebih besar ke dana serat aset lain perusahaan;
5. Kolusi, salah satu alasan melakukan pemisahan pekerjaan adalah untuk mencegah orang berpotensi melakukan kecurangan untuk benar – benar melakukannya. Ketika orang memiliki jabatan penting berkolusi, maka mereka menciptakan peluang untuk mengendalikan atau mendapatkan akses ke aset. Tetapi jika mereka tidak berkolusi maka tidak akan mendapatkannya.

### 2.2.5 Imbalan Pelaku Kecurangan

Imbalan yang diharapkan bagi para pelaku kecurangan beragam jenis. Menurut *Mulford (2010)* berbagai imbalan dibagi menjadi beberapa kategori berikut ini :

Tabel 2.2  
Imbalan Kecurangan

Kategori	Imbalan
Dampak pada harga saham	Mengurangi gejolak turun dan naiknya harga saham
	Meningkatkan nilai perusahaan
	Menurunkan biaya ekuitas
Dampak pada biaya pinjaman	Meningkatkan nilai opsi saham
	Meningkatkan kualitas kredit
	Rating utang jadi lebih tinggi
Dampak pada bonus yang diperoleh	Biaya pinjaman lebih rendah
	Kontrak keuangan lebih lunak
Dampak biaya politik	Menaikkan laba yang menjadi dasar pemberian bonus
	Menurunkan dampak regulasi
	Menghindari pajak yang lebih tinggi

Sumber : Mulford (2010)

### **2.2.6 Informasi dalam Mengungkapkan Kecurangan**

Informasi yang biasanya digunakan oleh auditor untuk mengakses resiko salah saji yang material akibat dari kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang diperoleh dari komunikasi diantara anggota tim audit berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai perusahaan yang sejenis, termasuk bagaimana dan dimana entitas memiliki kecenderungan terjadinya salah saji sebagai akibat dari kecurangan dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana manajemen dapat melakukan dan menyembunyikan tindakan – tindakan yang berbau kecurangan, cara – cara mengenai bagaimana aset perusahaan dapat digelapkan.
2. Jawaban manajemen atas pertanyaan auditor mengenai pandangan mereka terhadap resiko kecurangan serta mengenai cara – cara dan pengendalian yang digunakan untuk menangani resiko kecurangan yang teridentifikasi. Jika terjadi ketidaksamaan jawaban diantara mereka, auditor harus mencari informasi lain untuk mengatasi ketidaksamaan tersebut.
3. Pengetahuan atau informasi yang diperoleh melalui prosedur – prosedur lainnya berupa integritas dan kejujuran manajemen yang diperoleh auditor dalam proses awal penugasan, diskusi dengan manajemen, serta evaluasi atas tindak lanjut terhadap pengendalian intern yang disarankan untuk diperbaiki pada audit periode sebelumnya, dan sebagainya.

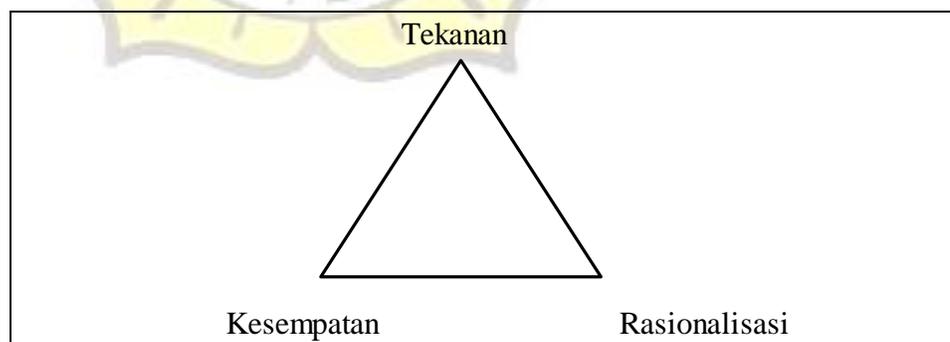
### **2.3 Segitiga Kecurangan**

Teori yang mendasar penelitian ini adalah teori segitiga kecurangan. Konsep segitiga kecurangan pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). Melalui serangkaian wawancara dengan 113 orang yang telah di hukum karena melakukan penggelapan uang perusahaan yang disebutnya “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”, yakni mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang ditiptkan kepada mereka. Cressey (1953) menyimpulkan bahwa :

**Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam – diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak – tanduk sehari – hari memungkinnya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang biasa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.**

Layaknya sebuah segitiga yang saling berhubungan antara satu sudut dengan sudut lainnya, ketiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan tersebut saling terkait satu dengan lainnya.

Gambar 2.2  
Segitiga Kecurangan



Sumber: Cressey (1953)

### 2.3.1 Tekanan

Tekanan atau motif yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba – coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja (Salman, 2005). Montgomery *et al.*, (2002) dalam Rukmawati (2011) mengatakan tekanan atau motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (*direct*) dan bentuk persepsi (*indirect*). Bentuk merupakan tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi – kondisi kehidupan yang nyata yang dihadapi oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Kondisi tersebut dapat berupa kebiasaan sering berjudi, kecanduan obat terlarang, atau menghadapi persoalan keuangan. Tekanan dalam bentuk persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya *executive need*.

Dari penelitiannya, Cressey juga menemukan bahwa *non – shareable problems* yang dihadapi orang – orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam enam kelompok :

1. *Violation of Ascribed Obligation*

Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan, membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Disamping harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. (Banyak lembaga negara dan asosiasi profesi dan bisnis Indonesia merasa perlu menyusun pedoman perilaku pejabat atau anggotanya. Bahkan keperluan yang lebih mendesak sering kali bukan pada penyusunan atau

pemberian pemahaman kepada yang akan diatur perilakunya, tetapi pada publikasi terhadap masyarakat bahwa kita sudah punya pedoman perilaku, tanpa peduli apakah perilakunya akan seperti yang tercantum dalam pedomannya).

## 2. *Problems Resulting from Personal Failure*

Kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan, sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya, dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Cressey mencontohkan bahwa seorang pengacara yang kehilangan tabungan hasil kerjanya bertahun – tahun. Ia menderita rugi karena menanamkan uangnya dalam bisnis yang bersaing dengan bisnis para pelanggannya. Ia percaya, kalau saja ia mau mengungkapkan masalahnya kepada para pelanggannya, mereka akan bersedia membantunya. Namun, ia merasa tidak mampu mengungkapkan kegagalan – kegagalan tersebut karena ia merasa telah mengkhianati para pelanggannya. Ia takut kehilangan statusnya sebagai orang yang dipercaya dalam bidang keuangan. Kehormatan pada diri sendiri menjadi awal kejatuhannya.

## 3. *Business Reversals*

Cressey menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang mengarah kepada *non – shareable problem*. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi di atas, karena pelakunya merasa bahwa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Dalam persepsinya, kegagalan itu karena

inflasi yang tinggi, atau krisis moneter atau ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, dan lain – lain.

4. *Physical Isolation*

Secara bebas situasi ini dapat diterjemahkan sebagai keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, orang itu bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain. Ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya. Cressey memberi contoh seorang yang tidak mampu mengungkapkan masalah keuangannya kepada orang lain.

5. *Status Gaining*

Situasi kelima ini tidak lain dari kebiasaan (buruk) untuk tidak mau kalah dengan orang lain. Cressey mencatat bahwa, *non – shareable problem* ketika orang itu menyadari bahwa ia tidak mampu secara finansial untuk naik ke status itu, untuk menikmati simbol – simbol keistimewaan yang dijanjikan status itu secara wajar dan sah, dan pada saat yang sama ia tidak bisa menerima kenyataan untuk tetap berada dalam status itu.

6. *Employer – Employee Relations*

Cressey menjelaskan bahwa umumnya situasi keenam ini mencerminkan kekesalan (atau kebencian) seorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia harus menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang. Menurut Cressey, masalah yang dihadapi orang itu menjadi *non – shareable problem* karena kalau ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, ia khawatir statusnya di organisasi itu menjadi terancam.

### 2.3.2 Peluang

Menurut *Montgomery et al., (2002)* dalam *Rukmawati (2011)* peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidaksiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Adanya *non – shareable problem* saja, tidaklah akan menyebabkan orang melakukan kecurangan. *Non – shareable problem* menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan. Akan tetap, pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang lain. Persepsi ini merupakan sudut kedua dari segitiga kecurangan.

Cressey berpendapat, ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan kecurangan dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau terkena sanksi. Kedua, *technical skill* atau keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian yang dimiliki orang itu dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Orang yang dipercayakan untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat kecurangan yang berkaitan dengan pengisian cek. Petugas yang menangani rekening koran di bank, mencuri dari nasabah yang jarang bertransaksi, dan lain – lain.

### 2.3.3 Pembeneran

Pembeneran atau rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembeneran atas perbuatannya. Sikap atau karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individu untuk secara rasional melakukan kecurangan. Integritas manajemen (sikap) merupakan penentu utama dari kualitas laporan keuangan. Ketika integritas manajer dipertanyakan, keandalan laporan keuangan diragukan. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. Bagi mereka dengan standar moral yang lebih tinggi, itu mungkin tidak begitu mudah. Pelaku kecurangan selalu mencari pembeneran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya (Molida, 2011).

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Christoper J. Skousen et al. (2009)	<i>Detecting and Predecting Financial Statement Fraud :The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99</i>	x = Tekanan x = Kesempatan x = Rasionalisasi y = Kecurangan	Penelitian ini secara empiris menguji efektivitas kerangka faktor resiko kecurangan. Menggunakan dan menguji variabel yang berkaitan dengan kecurangan perusahaan. Mengindetifikasi variabel tekanan, peluang, dan rasionalisasi
2	Albrecht et al. (2010)	<i>The Relationship Between South Korean Chaebols and Fraud</i>	x = Tekanan x = Kesempatan x = Rasonalisasi y = Kecurangan	Berbagai situasi yang menyebabkan empat perusahaan Chaebol di Korea melakukan tindak kecurangan bisa diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan

				<i>fraud triangle.</i>
3	Daniel T. H (2013)	<i>Detection Fraud of Financial Statement With Fraud Triangle</i>	$x = \text{Financial stability}$ $x = \text{Financial target}$ $x = \text{Innefective monitoring}$ $x = \text{External Pressure}$ $y = \text{Financial Statement Fraud}$	Mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan perspektif segitiga kecurangan : stabilitas keuangan , sasaran keuangan , dan tekanan eksternal yang baik , terbukti secara bersamaan memiliki dampak positif terhadap kecurangan laporan keuangan yang ditunjukkan oleh manajemen laba.
4	Atia Rahma Nabila (2013)	Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan dalam Perspektif <i>Fraud Triangle</i>	$x = \text{Tekanan}$ $x = \text{Kesempatan}$ $x = \text{Rasionalisasi}$ $y = \text{Kecurangan}$	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai efektivitas dari <i>fraud triangle</i> dalam mendeteksi kecurangan.
5	Michel Rendika (2013)	Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset	$x = \text{Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah}$ $x = \text{Peran Inspektorat}$ $y = \text{Penyalahgunaan Aset}$	Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauhmana pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset dan peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset. Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang.

Sumber: Berbagai literatur pendukung penelitian

## 2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3  
Kerangka Berpikir



Sumber : Berdasarkan *Donald Cressey* kemudian diolah penulis

Kecurangan mengacu pada kesalahan penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan menipu dan membuat pihak lain merasa aman untuk berantung pada fakta yang merugikan baginya. Berdasarkan penelitian Cressey, orang melakukan aktivitas kecurangan akibat interaksi dorongan yang berasal dari dalam kepribadian individu terkait dan dari lingkungan eksternal. Dorongan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum : (1) tekanan (*pressure*), (2) peluang (*opportunity*), (3) pembeneran (*rasionalisasi*). Ketiga dorongan ini dikenal sebagai “segitiga kecurangan”.

Hal yang berkaitan dengan kecurangan yang disampaikan dalam manajemen letter dapat disimpulkan bahwa kecurangan terjadi bisa diakibatkan oleh siapapun hanya saja yang berbeda adalah faktor pendorongnya. Oleh karena itu perusahaan diwajibkan untuk memahami seluk beluk kecurangan yang terjadi di dalam operasional perusahaan. Karena cara yang terbaik untuk mencegah kecurangan adalah dengan memahami apa sebenarnya yang menjadi penyebab kecurangan. Kecurangan bisa terjadi dimana saja dan dilingkungan apa saja mulai dari tingkatan yang paling tinggi sampai tingkatan yang paling rendah.

#### 1. Tekanan

Tekanan disebabkan oleh kondisi – kondisi kehidupan yang nyata yang dihadapi oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat terjadi saat manajemen sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya misalnya tekanan untuk biaya pengobatan, tekanan dari keluarga yang menuntut keberhasilan secara ekonomi, serta pola hidup mewah. Tekanan juga bisa timbul saat timbul saat kinerja perusahaan berada pada titik di bawah rata – rata. Untuk mengetahui apakah tekanan dapat menjadi dasar dalam melakukan kecurangan maka penelitian ini akan mengoreksi laporan audit yang berupa manajemen letter.

#### 2. Peluang

Peluang atau kesempatan dalam melakukan kecurangan laporan keuangan timbul dari beberapa kondisi yang menguntungkan seperti tidak adanya pengendalian internal, tidak adanya identifikasi kepemilikan, tidak adanya pemisahan tugas serta minimnya pencatatan, dan tidak adanya pengawasan oleh pihak perusahaan. Peluang yang timbul dari kondisi ini memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan oleh karena itu diperlukan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang

merupakan salah satu alat untuk mencegah kecurangan itu terjadi dan juga komite audit diperlukan dalam mengidentifikasi sebuah kecurangan. Untuk mengetahui apakah peluang dapat melakukan kecurangan maka penelitian ini akan mengkoreksi laporan audit yang berupa manajemen letter.

### 3. Pembeneran

Pembeneran sering dihubungkan dengan sikap karakter seseorang yang membenarkan nilai – nilai etis yang sebenarnya tidak baik. Pembeneran menjadi elemen yang sangat penting untuk pelaku kecurangan karena kebanyakan para pelaku tersebut tidak memiliki integritas dan sikap. Ketika para pelaku melakukan sebuah kecurangan cenderung mereka berfikir bahwa apa yang telah dilakukan benar atau sesuai perusahaan padahal hal tersebut dapat membuat keuangan atau operasional perusahaan menjadi kurang baik. Untuk mengetahui apakah ketika terjadi sebuah kecurangan dalam laporan keuangan selalu dilandasi dengan hal pembeneran maka penelitian ini akan mengkoreksi laporan audit yang berupa manajemen letter.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya yang mengakibatkan adanya temuan kecurangan dalam aset tetap yang disampaikan dalam manajemen letter. Penulis menganalisis manajemen letter dengan menggunakan pendekatan segitiga kecurangan, berikut ini adalah rincian dari manajemen letter :

1. Nomor inventaris aset belum dibuat
2. Terdapat kebun inti yang umur tanamannya melebihi 28 tahun
3. Pengelolaan persediaan yang kurang baik
4. Pemanfaatan aset (kandang sapi) belum optimal

5. Tidak ditemukannya fisik atas aset tetap milik PT. X
6. Ditemukan adanya bangunan kantor yang tidak tercatat dalam Daftar Kumpulan Aset Tetap yang berada di dalam perusahaan

